

**OPTIMALISASI PROSES DAN PERAN FORKOM PTNU
(PRESPEKTIF MANAJEMEN DAN PENGEMBANGAN MASYARAKAT
BANYUWANGI)**

Kholilur Rahman

Institut Agama Islam (IAI) Ibrahimy Genteng Banyuwangi, Indonesia

e-mail: lilur@iaibrahimy.ac.id

Abstract

On Friday, February 25, 2021 PC NU Banyuwangi held a discussion event NU academics by inviting Rector of IAI Ibrahimy Genteng, Rector of IAI Darussalam Blokagung Karangdoro and Chairman of STAI Darul Ulum Sumberberas. The discussion decided the establishment of PTNU Banyuwangi Communication Forum as a forum for friendship of NU academics. This forum places the top level of management in its structure. Kh. Ahmad Munib Syafa'at, L.c., M.El. (Rector of IAIDA) was appointed as the leader of the forum. This forum sets out the vision of "consolidated NU academics for the benefit of jam'iyah and NU Banyuwangi citizens, with the mission of becoming a reference forum for every issue both internal NU and external NU. The forum also sets out the working program: (a) regular thematic discussions (switching campuses) every month; (b) the lecturers are assisted to accompany institutions and banom and structures under PCNU, especially madrasahs under LP Ma'arif; (c) collaborative research on themes related to the existence of NU. Given the new age of this forum, its existence needs to be optimized, although some campuses have partially performed their role in community development, both individually and institutionally. This article (a) will review the optimalisasi process of PTNU in Banyuwangi, especially those incorporated in the PTNU Banyuwangi Communication Forum; (b) the prospect of its role for community development in the management perspective.

Keywords: *PTNU Banyuwangi, Communication Forum, Management Perspective, Community Development*

Accepted: January 25 2021	Reviewed: March 15 2021	Published: April 23 2021
------------------------------	----------------------------	-----------------------------

A. Pendahuluan

Sabtu, 27 Februari 2021 M 15 Rajab 1442 H di Kantor PC NU Banyuwangi, di bawah komando KH. Moh. Ali Makki Zaini (Ketua Tanfidziyah NU) akademisi NU Banyuwangi bersepakat mendirikan Forum Komunikasi PTNU Banyuwangi (Forkom PTNU Banyuwangi), suatu forum silaturahmi para akademisi NU. Sesuai

dengan namanya, Forum ini berfokus pada pengembangan Perguruan Tinggi Nahdlatul Ulama (PTNU) Banyuwangi, dan perannya bagi pengembangan masyarakat NU khususnya, dan masyarakat Banyuwangi umumnya.

Para ahli masih silang pendapat mendefinisikan PTNU. Sebagian memahaminya PTNU sebagai lembaga yang didirikan oleh NU. Sebagian yang lain memahaminya sebagai lembaga yang didirikan oleh individu atau kelompok yang berkultur NU, dan berbasis faham ahlu sunnah wal jama'ah. Di Banyuwangi terdapat 17 Perguruan Tinggi negeri dan swasta, hanya ada 4 PTS yang berbasis faham ahlu sunnah wal jama'ah

Tujuan dari penulisan ini: (a) mengeksplor potensi plus-minus PTNU Banyuwangi sehingga dapat menjadi input bagi Forkom PTNU untuk menemukan problem solvingnya, dan PTNU Banyuwangi mampu mengoptimalkan perannya, (b) potensi PTNU Banyuwangi mampu berkontribusi terhadap pengembangan masyarakat.

B. Pembahasan

1. Realita PTNU (Khususnya PTNU Banyuwangi)

Dalam pandangan penulis-sesuai dengan namanya- forum ini berfokus pada pengembangan PTNU dan perannya bagi warga NU. Beberapa argumen rasional patut dikemukakan mengapa forum ini harus terbentuk : *Kondisi Internal* (1) secara organisatoris, "perhatian NU" terhadap dunia pendidikan masih lemah sehingga banyak lembaga pendidikan NU, khususnya perguruan tinggi kurang memperoleh perhatian. (2) realita sosial menunjukkan, bahwa muncul gejala banyak kampus PTNU yang kehilangan marketnya karena performanya menurun. (3) perkembangan global menuntut dunia pendidikan mengadaptasikan dirinya dengan standar pendidikan nasional maupun internasional. Tidak sedikit akreditasi institusi maupun prodi PTNU dengan nilai "pas-pasan". (4) penyiapan calon-calon kader NU di lingkungan PTNU perlu memperoleh perhatian khusus. (5) keterbatasan kemampuan finansial PTNU belum mampu menjadi "daya perekat" bagi kader-kader NU untuk mengabdikan diri di lingkungan internal PTN.

Sedangkan argumentasi rasional terkait dengan *kondisi eksternal* pengembangan PTNU dan perannya bagi warga NU antara lain: (1) persaingan kompetitif antar perguruan tinggi cukup keras dan tidak mengenal batas : dalam negeri-luar negeri, negeri-swasta, perkotaan-pinggiran, nasionalis-religius. Semua bergerak dalam kepentingan dan ruang yang sama. (2) regulasi yang memperbolehkan modal asing masuk ke ranah perguruan tinggi, sehingga banyak kampus yang mendesain dirinya seperti *hoding company* atau menjadi *subsidiary company* lembaga lain. (3) adanya indikasi sebagian PTNU belum mampu

mengimbangkan laju perkembangan teknologi informasi yang demikian cepat, sehingga keberadaannya “terseok-seok” di tengah ketidak berdayaan. (4) belum adanya mekanisme advokasi dan jaringan yang kuat dalam rangka penciptaan *positioning* PTNU dengan PT lainnya.

Terlepas kedudukan Forum PTNU Banyuwangi ini berafeliasi ke LPTNU atau bergabung ke Asosiasi Perguruan Tinggi Nahdlatul Ulama (APTINU), tetapi keberadaannya sudah memperoleh “restu” dari PCNU Banyuwangi. Restu itulah yang harus menjadi *starting point* bagi pengurus forum ini untuk berfikir keras menyadari plus-minus PTNU secara umum, dan PTNU di kabupaten Banyuwangi secara khusus.

2. Pembentukan PTNU dan Penataan Forkom PTNU Banyuwangi

Kehadiran Perguruan Tinggi di tengah-tengah pembangunan bangsa memiliki peranan yang sangat penting. Ia merupakan sarana untuk melahirkan kaum terdidik dan intelektual guna menata kehidupan bangsa menuju ke arah yang lebih baik (Abbas, 2009, pp. 11–12). Semakin banyak kalangan terdidik dan kaum intelektual yang dihasilkan oleh Perguruan Tinggi, maka akan ada harapan meningkatkan kualitas kehidupan bangsa tersebut, dan negaranya akan berkembang lebih cepat.

Berdasarkan hal tersebut, maka pembangunan suatu negara atau suatu daerah banyak ditentukan oleh kiprah Perguruan Tingginya. Untuk itu dapat dipaparkan data Perguruan Tinggi yang berafeliasi ke LPTNU di Jawa Timur : 107 Perguruan Tinggi. Bernaung di bawah Kemenag RI 37 Perguruan Tinggi, bernaung di bawah Kemenritek-Dikti RI 70 Perguruan Tinggi. 600 Program Studi. 4. 132 dosen tetap, 73.329.193 mahasiswa(LPTNU Jatim, n.d.).

Sementara itu, Perguruan Tinggi di Banyuwangi yang berafeliasi ke NU sebanyak 4 (empat) Perguruan Tinggi : IAI Ibrahimy Genteng, IAI Darussalam Blokagung Tegalsari, STAI Darul Ulum Muncar, dan STES Ihya’ulumuddin Padang Singojuruh. 17 Program Studi, 154 dosen tetap, dan 3. 989 mahasiswa. Sedang akreditasi (instutusi maupun prodi) rata-rata dengan nilai “baik” (Forlap PD Dikti, n.d.).

Dalam usia Forkom PTNU Banyuwangi yang masih bisa dihitung dengan jari, ada baiknya diteropong terkait dengan problematika dan kekuatan yang ada di PTNU (khususnya PTNU di Banyuwangi) melalui analisis SWOT secara sederhana (Rangkuti, 2011, p. 67). Melalui analisis ini, diharapkan pengambilan keputusan oleh Forkom PTNU didasarkan pada pertimbangan potensi yang dimiliki dan melihat segala kemungkinan yang ada, dengan demikian keputusan yang diambil akan menjadi efektif dan terukur.

a. *Strengths* (kekuatan-kekuatan)

- 1) Jaringan/Anggota PTNU yang cukup banyak, hampir 150 PTNU di seluruh Indonesia (Santri Pedia, 2019). Baru 9 PTNU yang dinilai baik oleh LPTNU berdasarkan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) dan Sistem Penjaminan Mutu Eksternal (SPME). Sedangkan PTNU di Jawa Timur sebanyak 107 Perguruan Tinggi (Kemenag 37 dan 70 Kemenristekdikti).
- 2) Customer dan pelanggan yang jelas, yakni warga NU, (meskipun belum didukung oleh hasil penelitian yang valid).
- 3) Terdapat beberapa PTNU yang berkualifikasi baik, terakreditasi A (unggul) atau B (baik sekali) atau sering memenangkan kompetisi nasional. Unisma (Universitas Islam Malang) tak hanya naik peringkat di klasterisasi Kemendikbud (Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan), tapi juga prestasi mahasiswanya. Dari sebelumnya peringkat 66 di tahun lalu, menjadi peringkat ke-25 di tahun 2020 ini.
- 4) Potensi *row input* / calon mahasiswa baru dari sekolah ma'arif yang sangat besar. 193 SMA, 444 MA, 84 SMK di Jatim.

b. *Weaknesses* (kelemahan-kelemahan)

- 1) Citra PTNU yang belum bermutu
- 2) Lemahnya institusi dan manajemen PTNU
- 3) Kepercayaan Masyarakat yang cukup rendah pada PTNU
- 4) SDM yang belum profesional
- 5) Masih lemahnya akses, baik kepada pemerintah maupun stakeholder lainnya
- 6) Kurangnya kekompakan diantara PTNU
- 7) System penjaminan mutu masih belum menjadi arus utama
- 8) Banyak membuka program studi yang jenuh
- 9) Dana yang minim, fasilitas terbatas.

c. *Opportunities* (peluang-peluang)

- 1) Terdapat anggaran yang besar sekali di tangan pemerintah yang dapat dimanfaatkan
- 2) Perhatian pemerintah yang lebih baik terhadap masalah-masalah pendidikan
- 3) Dukungan Teknologi Informasi
- 4) Banyak peluang program studi baru yang memungkinkan dibuka

d. *Treats* (ancaman-ancaman)

- 1) Dunia PT merupakan salah satu yang terkena dampak globalisasi, ditandai dengan masuknya modal asing di dunia PT
- 2) Adanya PT yang dikelola dengan standar Internasional

3) Kompetitor PTN/PTS lain yang lebih ternama dan bermutu

4) Kuota PTN yang seolah tak terbatas.

Oleh karenanya, melalui Forkom PTNU Banyuwangi telah disepakati mengenai visi "*terkonsolidasinya akademisi NU untuk kemaslahaatan Jam'iyah dan warga NU Banyuwangi*, dengan misi *menjadi forum rujukan bagi setiap persoalan baik di internal NU maupun ekseternal NU*. Menelisik visi tersebut, Forkom PTNU Banyuwangi berfokus pada upaya untuk mewujudkan PTNU yang bermutu, mendapatkan kepercayaan publik dalam menghasilkan SDM bangsa yang cerdas (spiritual, intelektual, emosional), berkualitas, professional dan kompeten, berkinerja tinggi, serta produktif dan bermoral.

Untuk merealisasikan visi tersebut maka Forkom PTNU telah mempersiapkan program yang antara lain sebagai berikut.

1) Peningkatan Kualitas SDM

Pada ranah ini fokus kegiatannya dapat berupa sosialisasi, pelatihan, workshop maupun lokakarya yang terkait dengan tridhama Perguruan Tinggi seperti pelatihan AA dan pekerti, penelitian, jurnal, jabatan fungsional, dan lain sebagainya

2) Peningkatan dan Penguatan Institusi PTNU

Fokus kegiatan ini terletak pada penguatan PTNU dan pelaksanaan kegiatan seperti workshop tata kelola dan tata pamong Perguruan Tinggi, Pelatiman Simtem Penjaminan Mutu Internal dan Eksternal, lokakarya akreditasi maupun *fundrising*.

3) Peningkatan Kualitas Sistem Pengajaran

Program kegiatannya berkisar pada lokakarya dan pelatihan tentang pengembangann kurikulum, model dan strategi pembelajaran, , study banding, standarisai pengajaran materi keislaman, aswaja dan Ke NU an, pembelajaran IT, dan teknologi pembelajaran.

4) Penciptaan dan Penguatan Jaringan

Fokus kegiatan ini menekankan pada pada kerjasama, baik internal PTNU, antar PT maupun upaya untuk membuka jaringan dengan pemerintah dan stakeholder lainnya, baik dalam maupun luar negeri.

5) Perluasan Lahan Pengabdian

Dharma ketiga Perguruan Tinggi adalah pengabdian kepada masyarakat. Fokus dari kegiatan ini adalah memperluasa lahan pengabdian baik bagi forum maupun PTNU, khususnya bagi pengembangan lembaga atau banom NU umumnya dan masyarakat Banyuwangi pada umumnya.

Ketika eksistensi PTNU sehat baik manajemen maupun akademiknya, kemudian ditopang oleh kinerja Forkom PTNU sebagai lembaga jejaring, maka

PTNU dipastikan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan potensi masyarakat.

3. Peran Forkom PTNU dalam Pengembangan Masyarakat

Kendatipun peran dan kontribusi PTNU bagi pengembangan masyarakat Banyuwangi masih relatif sedikit (baik kuantitas maupun kualitasnya), namun melalui perjanjian kerjasama dalam bentuk MoU (*Memory of Understanding*) antara Pemerintah Kabupaten Banyuwangi dengan seluruh perguruan tinggi swasta yang ada di Banyuwangi. Bagi Perguruan Tinggi (Khususnya PTNU) MoU ini dapat dijadikan *starting point* bagi pengembangan masyarakat Banyuwangi.

Keberadaan Perguruan Tinggi merupakan mitra pemerintah daerah mensukseskan program kerjanya. Lebih jauh Bupati Banyuwangi Ipuk Fiestiandani mengatakan, “sebagai institusi pendidikan level teratas, perguruan tinggi memiliki peran yang strategis dalam memberikan pengaruh terhadap kebijakan pemerintah daerah melalui kajian ilmiah, sehingga pemerintah sangat membutuhkan saran dan masukan untuk kemajuan Banyuwangi, utamanya program pemulihan ekonomi di masa pandemi”.

Terkait dengan peran Perguruan Tinggi, Bupati Banyuwangi, Ipuk Fiestiandani mengakui mempunyai peran strategis dalam proses pembangunan Kabupaten Banyuwangi. Lebih jauh ia menyatakan “perguruan tinggi merupakan salah satu pilar pembangunan, sehingga perannya diperlukan dalam setiap tahapan pembangunan, baik dalam perencanaan, pelaksanaan, maupun evaluasi pembangunan daerah”.

Keterlibatan Perguruan Tinggi dalam pembangunan daerah dimulai semenjak kepemimpinan Bupati Abdullah Azwar Anas, hal itu diakuinya pada saat ia menjadi *keynot speaker* acara Seminar Nasional dan Temu Ilmiah Jaringan Peneliti Dosen PTKIS Kopertasi IV di Institut Agama Islam Darussalam Blok Agung Banyuwangi. Dalam paparannya, bupati menyampaikan bahwa Bapedda telah melibatkan beberapa PTKI di Banyuwangi untuk terlibat aktif memberikan sumbangsih dalam pembangunan melalui penelitian. Melalui paparan data tersebut, dapat dipahami bahwa Perguruan Tinggi mempunyai andil signifikan dalam pembangunan daerah dan pengembangan potensi masyarakatnya.

Secara umum pengembangan masyarakat (*community development*) dalam bahasa Arab disebut dengan *tathwirul mujtamā il-islamiy* adalah kegiatan pengembangan masyarakat yang dilakukan secara sistematis, terencana, dan diarahkan untuk memperbesar akses masyarakat guna mencapai kondisi sosial, ekonomi, dan kualitas kehidupan yang lebih baik apabila dibandingkan dengan kegiatan pembangunan sebelumnya (Budimanta & Rudito, 2008, p. 33).

Pengertian tersebut pada hakikatnya memberikan gambaran tentang upaya untuk meningkatkan kemampuan masyarakat serta berusaha menciptakan suatu kondisi yang menimbulkan inisiatif sendiri dari masyarakat yang bersangkutan. Melalui peningkatan kemampuan dan inisiatif mereka, diharapkan masyarakat semakin mandiri dan mampu memahami permasalahan yang dihadapi serta potensi yang mereka miliki untuk dimanfaatkan semaksimal mungkin

Bertolak dari pemahaman tersebut, Adi mengutip Arthur Dunham menjelaskan bahwa pengembangan masyarakat mencakup : 1) program terencana yang difokuskan pada seluruh kebutuhan masyarakat, 2) bantuan teknis, 3) berbagai keahlian yang terintegrasi untuk membantu masyarakat, dan 4) suatu penekanan utama atas *self help* dan partisipasi oleh masyarakat (Adi, 2002, p. 218).

Lebih lanjut Arthur Dunham mengemukakan bahwa dalam usaha menggambarkan pengembangan masyarakat, terdapat 5 (lima) prinsip dasar yang amat penting yaitu :

- 1) Penekanan pada pentingnya kesatuan kehidupan masyarakat dan hal yang terkait dengan hal tersebut
- 2) Perlu adanya pendekatan antar tim dalam pengembangan masyarakat
- 3) Kebutuhan akan adanya *community worker* yang serba bisa (*multi purpose*) pada wilayah pedesaan
- 4) Pentingnya pemahaman akan pola budaya masyarakat local
- 5) Adanya prinsip kemandirian yang menjadi prinsip utama dalam pengembangan masyarakat (Adi, 2002, p. 219).

Sementara itu, terdapat 6 (enam) dimensi yang menjadi perhatian dalam pelaksanaan pengembangan masyarakat (*community development*), yang saling terkait satu dengan lainnya. Kegagalan pada satu dimensi akan sangat berpengaruh terhadap dimensi yang lainnya. Adapun keenam dimensi tersebut mencakup dimensi sosial, ekonomi, politik, kebudayaan, lingkungan dan personal/spiritual (Ife, 1995, p. 131).

Keberhasilan pelaksanaan pengembangan masyarakat dimaksudkan untuk mencapai beberapa tujuan, antara lain : 1) Memperbaiki kualitas hidup melalui pemecahan masalah secara bersama. 2) Membina dan mempertahankan nilai-nilai demokrasi sebagai bagian dari proses pengorganisasian dan sebagai hasil dari pengembangan masyarakat. Dan 3) Memberi ruang kepada masyarakat untuk mengembangkan potensi mereka sebagai individu (Rubin & Rubin, 1992, p. 131).

Sementara itu, berkaitan dengan wilayah-wilayah pengembangan masyarakat meliputi 3 (tiga) wilayah yang mendesak untuk diperjuangkan dalam konteks keummatan yaitu pengembangan dalam tataran ruhaniyah, intelektual dan ekonomi (Efendi, 1999, pp. 4-5). Dalam kaitannya dengan ketiga wilayah

pengembangan tersebut, eksistensi Perguruan Tinggi mempunyai kedudukan dan fungsi penting dalam perkembangan suatu masyarakat. Proses kebijakan sosial (*social development*) di masyarakat itu benar-benar terwujud dalam peran yang nyata.

Pada umumnya peran Perguruan Tinggi diharapkan tertuang dalam Tri Dharma Perguruan Tinggi, yaitu: Dharma pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat. Dengan dharma pendidikan perguruan diharapkan melakukan peran mencerdaskan masyarakat dan transmisi budaya. Dengan dharma penelitian, perguruan tinggi diharapkan melakukan "*finding solution*" temuan-temuan baru ilmu pengetahuan dan inovasi kebudayaan. Dengan dharma pengabdian masyarakat, perguruan tinggi diharapkan melakukan pelayanan masyarakat untuk ikut mempercepat proses peningkatan kesejahteraan dan kemajuan masyarakat. Melalui dharma pengabdian pada masyarakat inilah perguruan tinggi juga akan memperoleh *feedback* dari masyarakat tentang tingkat kemajuan dan relevansi ilmu yang dikembangkan perguruan tinggi itu.

Implementasi dharma pengabdian ini terasa semakin *urgan* pada saat masyarakat tertimpah musibah covid-19. Sebagai ilustrasi, IAI Ibrahimy bekerjasama dengan Pemda Tingkat II Banyuwangi dan Polresta Kabupaten Banyuwangi. Wujud dari kerjasama itu antara lain: (a) mahasiswa peserta KKN mengedukasi masyarakat dengan melakukan sosialisasi protokol kesehatan, (b) mahasiswa peserta KKN terlibat langsung dalam gerakan kampung tangguh yang menjadi program unggulan kepolisian di era covid-19, (c) mahasiswa peserta KKN berpartisipasi aktif dalam pemberdayaan masyarakat/UMKM yang terdapat covid-19, dan seterusnya.

4. Konsep Pengembangan Masyarakat Partisipatif Emansipatif

Pada hakikatnya, pembangunan masyarakat merupakan proses dinamis yang berkelanjutan dari dan untuk masyarakat guna terwujudnya keinginan dan harapan hidup yang lebih sejahtera, serta dengan menghindari kemungkinan tersudutnya masyarakat sebagai pengguna akses pembangunan (daerah, regional maupun nasional).

Pemahaman ini mengandung makna betapa pentingnya inisiatif lokal, partisipasi masyarakat sebagai bagian dari model-model pembangunan yang dapat mensejahterakan kehidupan masyarakat. Pembangunan ini tidak berpusat pada birokrasi, melainkan berpusat pada masyarakat dan komunitasnya sendiri. Untuk itu diperlukan konsep pemikiran yang lebih detail sebagaimana berikut ini.

a. Pembangunan berwawasan manusia

Salah satu media yang dapat dilakukan dalam proses pengembangan masyarakat adalah melalui pembangunan. Banyak cara, metode dan strategi dalam mencapai tujuan pembangunan. Namun substansi atau hakikat dari suatu pembangunan adalah pembangunan yang berwawasan manusia. Artinya, hakikat pembangunan adalah untuk membentuk manusia-manusia yang otonom, yang memungkinkan mereka bisa mengaktualisasikan segala potensi terbaik yang dimilikinya secara optimal. Dari sini, muncul keberagaman dan spesialisasi sehingga menyuburkan pertukaran (*exchange*) atau transaksi. Inilah yang menjadi landasan kokoh bagi terwujudnya manusia-manusia-manusia unggulan sebagai modal utama terbentuknya daya saing nasional dalam menghadapi persaingan global (Hamid, 2018, p. 43).

Pertukaran atau transaksi merupakan perwujudan dari interaksi antar manusia dengan segala keberagaman dan kelebihan masing-masing. Hasil dari transaksi atau interaksi tersebut adalah kesejahteraan sosial (*social welfare*), sebagaimana dijanjikan oleh prinsip keunggulan komparatif (*comparative advantage*) (Basri, 2002, p. 113).

b. Pembangunan yang berpusat pada rakyat

Model pendekatan pembangunan yang berpusat pada rakyat lebih menekankan pada pola pemberdayaan, yaitu menekankan, yaitu menekankan kenyataan pengalaman masyarakat dalam sejarah penjajahan dan posisinya dalam tata ekonomi internasional. Oleh karena itu, pendekatan ini berpendapat bahwa masyarakat harus menggugat struktur dan situasi keterbelakangan secara simultan dalam berbagai tahapan.

Harry Himat-mengutip Koreten dan Camer- menyatakan, bahwa konsep pembangunan yang berpusat kepada rakyat memandang inisiatif kreatif dari rakyat sebagai sumber daya pembangunan yang paling utama, dan memandang kesejahteraan material dan spiritual mereka sebagai tujuan yang ingin dicapai oleh proses pembangunan (Hikmat, 2010, p. 90).

Konsepsi dasar bagi perencanaan pembangunan yang berpusat kepada masyarakat, yaitu :

- 1) Penekanan pada dukungan dan pembangunan usaha-usaha Swadaya kaum miskin untuk menangani kebutuhan-kebutuhan mereka sendiri.
- 2) Kesadaran bahwa meskipun sektor modern merupakan sumber utama bagi pertumbuhan ekonomi konvensional, tetapi sektor tradisional menjadi sumber-sumber daya lokal dan sumber utama bagi kehidupan bagi sebagian besar rumah tangga miskin.

- 3) Kebutuhan adanya kemampuan kelembagaan yang baru dalam usaha membangun kemampuan para penerima bantuan miskin demi pengelolaan yang produktif dan swadaya berdasarkan azas kebermanfaat.

c. Pembangunan berwawasan partisipasi emansipatif

Salah satu hal yang membedakan manusia dengan makhluk yang lain adalah daya pikir, akal dan nalar yang dilikinya. Ketiga daya inilah yang menyebabkan manusia mempunyai kemampuan untuk membedakan antara sesuatu yang pantas dan tidak pantas, antara yang wajar dan tidak wajar. Dengan kata lain, manusia dalam aksi dan interaksinya antar sesama manusia akan terikat dengan pada norma, moral dan etika. Dari sinilah diperlukan partisipasi dengan perwujudannya yang bervariasi.

Pengertian partisipasi dalam pembangunan menurut Korten dalam Alftri, bukanlah semata-mata partisipasi dalam melaksanakan program, rencana, dan kebijakan pembangunan, tetapi partisipasi yang emansipatif. Pembangunan dari, oleh dan untuk masyarakat dalam menghadapi persoalan tentang internalisasi nilai ke dalam lembaga sosial politik yang ada dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Permasalahan pokoknya adalah, pemahaman dan kepekaan terhadap perbedaan demokrasi formal dan demokrasi material (Alftri, 2011, p. 39).

Lebih jauh ditegaskan, bahwa walaupun pembangunan dilakukan dengan gegap gempita dengan volume yang cukup tinggi, namun sepi dari partisipasi masyarakat dalam perspektif *Millenium Development Goals (MDGs)* atau tujuan pembangunan milenium, maka pembangunan seperti itu dianggap gagal. Sebaliknya, pembangunan dengan skala sederhana tetapi melibatkan partisipasi masyarakat yang cukup banyak, dan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat, maka akan lebih berharga di mata masyarakat banyak. Hal ini menunjukkan, bahwa indikator pembangunan manusia adalah seberapa besar masyarakat masyarakat bias terlibat aktif. Semakin banyak masyarakat yang terlibat dalam pembangunan, berarti pembangunan tersebut semakin baik (Oos, 2014, p. 43).

Guna memperoleh pemahaman yang lebih komprehensif tentang partisipasi masyarakat dalam pembangunan, berikut penulis uraikan tipologi partisipasi masyarakat: (1) *Passive Participation*: Masyarakat terlibat langsung dalam pembangunan, karena memang diharuskan untuk ikut serta tanpa ada kemampuan untuk merubah. (2) *Participation on Information Giving*. Masyarakat berpartisipasi dalam pembangunan hanya sebatas memberikan informasi yang dibutuhkan oleh perencana pembangunan, dengan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan. Masyarakat tidak punya kemampuan untuk

mempengaruhi dalam pembuatan pertanyaan, dan tidak ada kesempatan untuk mengecek dari hasil penelitian perencanaan. (3) *Participation by Consultation* Partisipasi masyarakat dilakukan dalam bentuk konsultasi, ada pihak luar sebagai pendengar yang berusaha mendefinisikan permasalahan yang dihadapi masyarakat dan merumuskan solusinya. Dalam proses konsultasi ini tidak ada pembagian dalam penentuan keputusan, semua dikerjakan oleh pihak luar yang diberi mandate untuk mengerjakannya. (4) *Participation of Material Incentive* Dalam partisipasi ini, lebih pada masyarakat yang memberikan yang memberikan sumber daya yang mereka miliki, seperti tanah, tenaga atau dana, kemudian akan diganti dalam bentuk makanan, uang, atau penggantian dalam bentuk materi lainnya. (5) *Functional Participation*. Partisipasi masyarakat terjadi dengan membentuk kelompok-kelompok atau kepanitian yang diprakarsai/ didorong oleh pihak luar untuk terlibat dalam pembangunan. (6) *Interactive Participation*. Masyarakat dilibatkan dalam menganalisis dan perencanaan pembangunan. Dalam tipe partisipasi ini, kelompok mungkin saja dapat dibentuk bersama-sama dengan lembaga donor dan mempunyai tugas untuk mengenalkan dan memutuskan semua permasalahan yang terjadi ditingkat lokal. (7) *Self Mobilization*. Masyarakat secara mandiri berinisiatif untuk melakukan pembangunan tanpa ada campur tangan dari pihak luar. Walaupun ada, maka peran pihak luar hanya sebatas membantu dalam penyusunan kerangka kerja. Mereka mempunyai fungsi control penuh terhadap sumber daya yang akan digunakan untuk mencapai kesejahteraan masyarakatnya. (8) *Catalysing Change*. Partisipasi dengan membentuk agen perubahan dalam masyarakat yang nantinya dapat mengajak atau mempengaruhi masyarakatnya untuk melakukan perubahan. (9) *Optimum Participation*. Partisipasi dalam bentuk ini lebih memfokuskan pada konteks dan tujuan pembangunan, dan itu akan turut menentukan bentuk partisipasi yang akan diberikan. Partisipasi akan optimal jika turut memerhatikan secara detail kepada siapa saja yang akan berpartisipasi, karena tidak semua orang dapat berpartisipasi, dengan metode ini pula dapat membantu menentukan strategi yang optimal dalam pembangunan, dan (10) *Manipulation* Ada sejumlah partisipasi namun tidak memiliki kekuasaan yang nyata, masyarakat membentuk suatu kelompok atau kepanitian, namun tidak memiliki kekuasaan untuk menentukan arah pembangunan (Ryandono & et al, 2014, p. 8).

Pembangunan berwawasan partisipasi emansipatif menuntut kemampuan “lebih” Perguruan Tinggi untuk mewujudkannya. Pada satu sisi, insan akademik Perguruan Tinggi dituntut mempunyai kompetensi terkait dengan obyek penelitiannya sebagai komitmen keberpihakan kepada pembangunan masyarakat, tetapi pada sisi yang lain, ia juga dituntut untuk mampu menciptakan jaringan

harmois ke pemerintah daerah, baik sebagai regulator maupun eksekutor kebijakan. Kemampuan mengharmonisasi kedua sudut yang sering berbeda itulah yang dimaksud dengan kemampuan lebih.

Potret keterlibatan Perguruan Tinggi dalam pembangunan daerah dan pengembangan masyarakat di Banyuwangi adalah suatu kenicayaan yang tidak mungkin dipungkiri. Wakil Bupati Yusuf Widiyatmoko, dalam sambutannya mengakui dengan mengungkapkan data hasil penelitian Perguruan Tinggi Banyuwangi : tahun 2012 terdapat 11 penelitian, tahun 2013 ada 13 penelitian, tahun 2015 dengan 10 judul penelitian, dan tahun 2015 ada 12 judul penelitian, tahun 2016 ada 15 judul penelitian.

Penelitian tersebut mengasilkan rekomendasi kebijakan untuk pemerintah daerah, kemudian akan menjadi acuan dalam pengambilan kebijakan terutama daerah-daerah yang menjadi basis penelitian. Hasil penelitian ini, pada gilirannya akan mampu mendorong tumbuhnya kesejahteraan masyarakat, memberdayakan desa, dan meningkatkan akses masyarakat terhadap kesehatan, pendidikan dan pelayanan publik. Inilah hakikat pembanguna daerah untuk mengemangkan masyarakatnya dengan wawasan partisipasi emansipatif.

C. Simpulan

Terbentuknya Forum Komunikasi PTNU Banyuwani (FORKOM PTNU Banyuwangi) memberikan harapan besar terhadap *jam'iyah* dan *jam'ah* NU untuk lebih memperhatikan pada cita-cita dasar perjuangan NU semenjak awal didirikan (31 Januari 1926 H/16 Rajab 1334 H), yaitu (1) ekonomi kerakyatan, (2) ekonomi kerakyatah, dan (3) kebangsaan.

Harapan besar itu kita wujudkan dengan lebih memperhatikan persoalan pendidikan, persoalan sosial kemasyarakatan, dan persoalan kesejahteraan lainnya daripada persoalan politik peraktis dan kepentingan jangka pendek, karena ternyata setelah disadari bahwa kebesaran NU sesungguhnya terdapat dalam kegiatan-kegiatan tersebut.

Mengingat Usia Forkom PTNU Banyuwangi relatif baru, sementara beban pembangunan dan pengembangan masyarakat cukup berat, maka PTNU yang tergabung di dalamnya harus melakukan:

1. Pembinaan dan Optimalisasi Peran PTNU di Banyuwangi

a. Menyadari realita potensi dan tantangan PTNU di Banyuwangi

Kesadaran akan realita potensi dan tantangan PTNU di Banyuwangi didasarkan kepada :

- 1) *Kondisi Internal* : (1) Perhatian NU" terhadap dunia pendidikan masih lemah. (2) banyak kampus PTNU yang performanya menurun. (3) tidak

sedikit akreditasi institusi maupun prodi PTNU dengan nilai “pas-pasan”. (4) penyiapan calon-calon kader NU di lingkungan PTNU perlu memperoleh perhatian khusus. (5) keterbatasan kemampuan finansial PTNU

- 2) *Kondisi eksternal* : (1) persaingan kompetitif antar perguruan tinggi cukup keras dan tidak mengenal batas (2) regulasi yang memperbolehkan modal asing masuk ke ranah perguruan tinggi, (3) indikasi sebagian PTNU belum mampu mengimbangkan laju perkembangan teknologi informasi yang demikian cepat, (4) belum adanya mekanisme advokasi dan jaringan yang kuat dalam rangka penciptaan *positioning* PTNU dengan PT lainnya

b. Pembenahan PTNU dan Penataan Forkom PTNU Banyuwangi

Pembenahan ini ada baiknya diteropong terkait dengan problematika dan kekuatan yang ada di PTNU (khususnya PTNU di Banyuwangi) melalui analisis SWOT : kekuatan (*Strenght*), peluang (*Oportunities*), kelemahan (*Weaknesses*) dan ancaman (*Threats*).

Analisis ini dimaksudkan untu bias mewujudkan visi dan misi PTNU, sehingga ditetapkanlah program :

- 1) Peningkatan Kualitas SDM PTNU
- 2) Peningkatan dan Penguatana Institusi PTNU
- 3) Peningkatan Kualitas Sistem Pengajaran PTNU
- 4) Penciptaan dan Penguatan Jaringan PTNU
- 5) Perluasan Lahan Pengabdian PTNU.

2. Prospek Peran PTNU bagi pengembangan masyarakat (prespektif manajemen)

- a. Menciptakan jaringan dengan Perguruan Tinggi (interen dan ekstern Banyuwangi, dan pemerintah Daerah. Diwujudkan dengan melakukan MoU (*Memory of Understanding*) 13 PTS di Banyuwangi dengan Pemerintah Kabupaten Banyuwangi (9 Maret 2021)
- b. Kolaborasi peneltian lintas disiplin ilmu dengan Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bapedda) Banyuwangi.
- c. Mengeterapkan dan mengembangkan konsep pengembangan masyarakat partisipatif emansipatif, didasarkan pada konsep pemikiran :
 - 1) Pembangunan berwawasan manusia
 - 2) Pembangunan berpusat pada rakyat
 - 3) Pembangunan berwawasan pertisipasi emansipatif

Pamungkas dari naskah ini, diharapkan semua PTS Banyuwangi (khususnya PTNU) untuk (a) melakukan pembenahan internal lembaganya masing-masing,

dan (2) keterbatasan yang menggelayut pada masing-masing lembaga bukan hambatan berarti untuk terlibat aktif dalam pembangunan dan pengembangan masyarakat

Daftar Rujukan

- Abbas, S. (2009). *Manajemen Perguruan Tinggi*. Kencana Prenada Media Group.
- Adi, I. R. (2002). *Pemikiran-Pemikiran Dalam Pembangunan Kesejahteraan Sosial Sosial*. Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia.
- Alfri. (2011). *Community Development, Teori dan Aplikasi*. Pustaka Pelajar.
- Basri, F. (2002). *Perekonomian Indonesia*. Erlangga.
- Budimanta, A., & Rudito, B. (2008). *Metode dan Teknik Pengelolaan Community Development*. CSD.
- Efendi, A. (1999). *Pemberdayaan dalam Fitrah*. Alsina: Center for Methodological Transformation.
- Forlap PD Dikti. (n.d.). *Data Perguruan Tinggi di Banyuwangi*. <https://pddikti.kemdikbud.go.id/>
- Hamid, H. (2018). *Manajemen Pemberdayaan Masyarakat*. De La Macca.
- Hikmat, H. (2010). *Strategi Pemberdayaan Masyarakat*. Humaniora.
- Ife, J. (1995). *Community Development: Creating Community Alternatives Vision, Analysis and Practice*. Longman Inc.
- LPTNU Jatim. (n.d.). *Data Perguruan Tinggi NU*. <http://lptnujatim.or.id/data-perguruan-tinggi-nahdlatul-ulama-jatim/>
- Oos, M. A. (2014). *Pemberdayaan Masyarakat Di Era Global*. Alfabeta.
- Rangkuti, F. (2011). *SWOT Balanced Scorecard Teknik Menyusun Strategi Korporat yang Efektif plus Cara Mengelola Kinerja dan Risiko*. PT Gramedia Pustaka Utama.
- Rubin, H. J., & Rubin, I. S. (1992). *Community Organizing and Development*. Allyn and Bacon.

Ryandono, & et al. (2014). Pemberdayaan Masyarakat dalam Era Otonomi Daerah. *Jurnal: Pembangunan Pemberdayaan Pemerintahan, IPDN*, 6(1).

Santri Pedia. (2019). *Daftar Perguruan Tinggi Nahdatul Ulama*. <https://www.santripedia.com/2019/10/daftar-perguruan-tinggi-nahdlatul-ulama.html>